

# Presiden: Komunikasi Publik Vaksin COVID-19 Jangan Seperti UU Ciptaker

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan komunikasi publik terkait vaksin COVID-19 agar tidak menciptakan respon negatif dari masyarakat seperti saat penyusunan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).



Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas melibatkan sejumlah menteri dan pejabat terkait.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/10).

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik "Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020" yang dihadiri langsung para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Seperti diketahui, pada 8 Oktober 2020 terjadi demonstrasi besar-besaran setidaknya di 18 provinsi oleh buruh, mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi tersebut juga diwarnai dengan kerusuhan di beberapa tempat. "Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa," ungkap Presiden.

Namun komunikasi publik yang dimaksudkan Presiden Jokowi juga bukan akhirnya membuka semua data pemerintah kepada masyarakat. "Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," tambah Presiden.

Titik kritis dari vaksinasi, menurut Presiden Jokowi, adalah di implementasi. "Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu? Kenapa dia? Semua harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komunikasi publik ini yang betul-betul disiapkan," ungkap Presiden.

Tujuan dari komunikasi publik yang baik itu adalah agar tidak ada lagi isu vaksin yang nantinya dapat dipintir. "Siapa yang (mendapat vaksin secara) gratis, siapa yang mandiri? Harus dijelaskan, harus detail, jangan nanti dihanam oleh isu, dipintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit," tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, seharusnya ada pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN dalam pengerjaan vaksin tersebut. "Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 meliputi:

- pengadaan vaksin COVID-19;
  - pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  - pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
  - dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Waktu vaksinasi sendiri adalah mulai 2020-2022.

Hingga saat ini menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin COVID-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis.

Sasaran penerima vaksin COVID-19 nantinya sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

- Garda terdepan seperti medis dan paramedis 'contact tracing', pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
- Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.000 dosis
- Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
- Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
- Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
- Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

(ANTARA)

## Presiden Minta Pencegahan Kenaikan Kasus COVID-19 pada Libur Panjang Akhir Oktober 2020

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mencegah terjadinya lonjakan kenaikan kasus penularan COVID-19 saat libur panjang selama lima hari, sejak Rabu (28/10) hingga Minggu (1/11) 2020.

"Kita memiliki pengalaman kemarin, libur panjang 1,5 bulan lalu (akhir Agustus 2020), mungkin setelah itu terjadi kenaikan (kasus COVID-19) yang agak tinggi," kata Presiden dalam rapat terbatas mengenai Antisipasi Penyebaran COVID-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Jakarta, Senin (19/10).

Presiden mengingatkan agar lonjakan kenaikan kasus COVID-19 saat musim libur panjang di akhir Agustus 2020 lalu jangan sampai terulang. "Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar

kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID-19," kata Presiden.

Hingga 18 Oktober 2020, penanganan COVID-19 di Indonesia, kata Presiden, sudah menunjukkan perbaikan. Misalnya, tingkat kasus aktif COVID-19 di Indonesia telah menurun menjadi 17,69 persen dibanding bulan sebelumnya. Persentase kasus aktif COVID-19 itu lebih rendah dibanding kasus aktif COVID-19 di dunia yang sebesar 22,54 persen.

"Kemudian dibanding bulan yang lalu rata-rata kematian karena COVID-19 di Indonesia juga menurun dari 3,94 persen menjadi 3,45 persen. Sekali lagi, menurun dari bulan lalu 3,94 persen

menjadi 3,45 persen," ujar dia.

Sementara untuk tingkat kesembuhan di Indonesia, saat ini sebesar 78,84 persen atau lebih tinggi dari rata-rata kesembuhan pasien COVID-19 di dunia yang sebesar 74,67 persen.

"Saya kira hal-hal seperti ini yang harus terus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia semakin menurun," ujar Presiden.

Adapun pemerintah telah menetapkan cuti bersama pada akhir Oktober 2020, tepatnya di 28 dan 30 Oktober 2020 yang mengapi tanggal merah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 29 Oktober. Kemudian, pada 31 Oktober 2020 dan 1 November 2020 merupakan jadwal akhir pekan.

(ANTARA)

## Bantul Memperketat Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat

YOGYAKARTA

Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memantau penerapan protokol kesehatan di lingkungan pasar rakyat untuk memperketat pelaksanaan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di pusat perdagangan masyarakat.

"Targetnya memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, karena satu-satunya jalan memutus peredaran COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat," kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Budi Wibowo usai monitoring protokol kesehatan di Pasar Ngipik, Bantul, Senin (19/10).

Menurut dia, kebiasaan dalam menerapkan protokol kesehatan ketat harus dilaksanakan semua elemen masyarakat, termasuk bagi pedagang pasar yang aktifitasnya berinteraksi dengan orang



Pjs Bupati Bantul Budi Wibowo membagikan masker kepada pedagang dalam upaya memperketat penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Pasar Ngipik, Bantul.

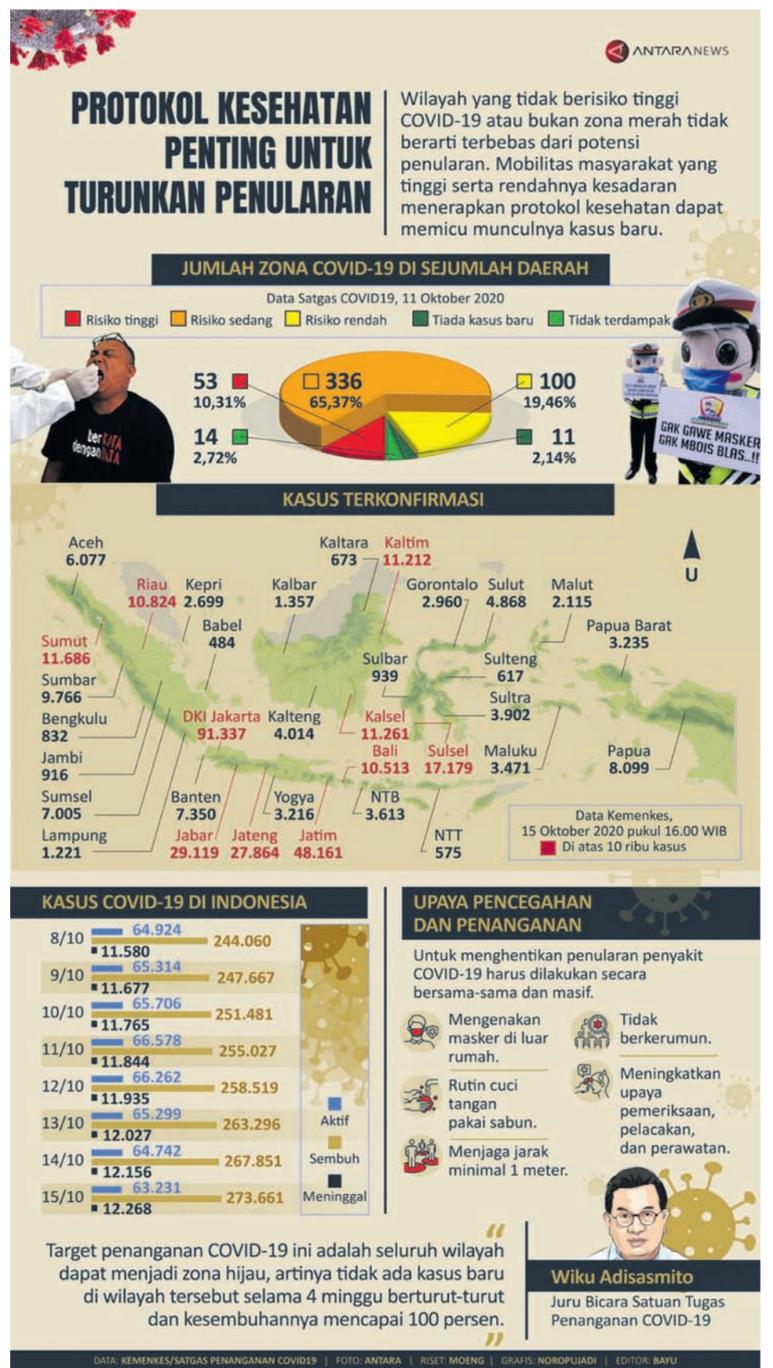
lain, sehingga potensi terhadap penularan virus corona tersebut harus diantisipasi.

"Tidak bisa tidak lagi, jadi semua masyarakat harus memahami bahwa ini sudah menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi perilaku, kalau ini tidak bisa menjadi kebiasaan baru pastilah (pengendalian COVID-19) tidak

akan sukses," katanya.

Pjs Bupati mengatakan, terlebih perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di DIY termasuk Kabupaten Bantul cukup signifikan, sehingga agar tidak muncul kekhawatiran kasus semakin meluas, pencegahan perlu terus dikampanyekan dan diperberat.

"Selain pasar, tentunya juga kantor-kantor, karena kan kluster-kluster sudah masuk kantor. Artinya prokes (protokol kesehatan) ini harus kita bumikan kepada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul menyadari bahwa dengan cara inilah kita bisa sehat," katanya. (ANTARA)



## Pemkab Jepara Minta Kepala Desa Ambil Langkah Mitigasi Dampak COVID-19

JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, meminta semua kepala desa dan perangkat desa untuk lebih aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dengan mengambil langkah mitigasi dampak virus corona.

"Kami berharap dukungan kepala desa dan perangkat desa karena sudah mendekati zona kuning. Mari sama-sama menjadika nprotokol kesehatan sebagai kebutuhan," kata Bupati Jepara Dian Kristiandi saat menghadiri acara Rapat Koordinasi dengan kepala desa dan BPD di Pendopo Kartini Jepara, Senin (19/10).

Menurut dia langkah-langkah mitigasi dampak COVID-19 bisa dilakukan dengan melarang warga untuk berkerumun. Selain itu, kata dia, mereka juga harus mampu me-

ngendalikan informasi mengenai COVID-19, agar masyarakat tidak cemas dan resah. "Sege- ra olah data dan informasi warga masyarakat, yang mencakup kondisi ekonomi," ujarnya.

Ia berharap sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif agar menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk bisa masuk kategori zona kuning, maka syaratnya harus risiko rendah sehingga cara yang bisa ditempuh dengan dukungan semua pihak untuk menjaga protokol kesehatan.

Pemerintah desa juga diinstruksikan untuk membantu warga yang terkena dampak pandemi COVID-19, sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat. (ANTARA)

## DIY Dorong Penjualan Ikan Budi Daya Secara Daring di Tengah Pandemi

YOGYAKARTA - Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pelaku usaha budi daya ikan di daerah ini mengoptimalkan pemasaran produksi secara digital atau daring untuk meningkatkan penjualan di tengah pandemi COVID-19.

"Kalau pembudidaya mungkin saat ini belum semua memahami pemasaran secara daring. Tetapi paling tidak bisa dibantu oleh masing-masing kelompoknya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY Bayu Mukti Sasongka di Yogyakarta, Senin (19/10).

Bayu menilai saat ini sekitar 70 persen pelaku usaha budi daya ikan di DIY sudah memahami pemasaran secara daring. Untuk meningkatkan kemampuan itu, DKP DIY dan dinas di kabupaten/kota telah memfasilitasi berbagai pelatihan.

Salah satu sarana pemasaran daring yang dapat digunakan pelaku usaha di DIY, kata Bayu, melalui platform SiBakul yang dikembangkan Dinas Koperasi dan UKM DIY. "Teman-teman sudah kami imbau bergabung di SiBakul karena nanti produk mereka bisa di antar secara gratis," kata dia. Selain melalui SiBakul,

menurut Bayu, DKP DIY juga ikut serta membantu pemasaran produk ikan budi daya dengan mempromosikan melalui sejumlah grup media sosial di kalangan ASN Pemda DIY.

Kendati tingkat penjualan belum bisa kembali seperti saat kondisi normal, ia menilai sarana pemasaran secara daring cukup signifikan membantu para pembudidaya ikan untuk bertahan di tengah pandemi.

"Sekarang sudah lumayan, dengan pemasaran secara daring ikan 5 ton bisa habis terjual. Awal-awal COVID-19 dulu banyak yang mengeluh kesulitan bagaimana memasarkannya," kata dia.

Selain mendorong pemasaran secara daring, menu-

rut Bayu para pembudi daya ikan di DIY juga dilatih untuk melakukan diversifikasi produk olahan ikan. Tujuannya, untuk memberikan penghasilan tambahan bagi mereka.

DKP DIY mencatat kebutuhan produksi ikan di DIY rata-rata mencapai 105.000 ton per tahun. Dari total kebutuhan itu, ia berharap 75 persen di antaranya dapat dipenuhi dari sektor ikan budi daya seperti nila, gurame, serta lele.

"Kalau untuk sektor produksi ikan tangkap tidak ada masalah. Nelayan rata-rata tidak kesulitan, tinggal menangkap di laut dan langsung menjual di tempat pelelangan ikan," kata dia.

(ANTARA)



Petugas menunjukkan benih ikan nila.